



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 5866-5880

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran ECPAT dalam Menanggulangi Eksploitasi Seks Anak dan Perempuan dalam Sektor Pariwisata di Thailand

Kinanti Diah Ayu Setyowati<sup>1✉</sup>, Zahra Aura Aprilia<sup>2</sup>, Savina Rahmad<sup>3</sup>, Siti Nurhaliza<sup>4</sup>, Annisa  
Ramadhani Santosa<sup>5</sup>, Nabilah Nurul Syafira<sup>6</sup>  
Universitas Singaperbangsa Karawang  
Email: [2210631260008@student.unsika.ac.id](mailto:2210631260008@student.unsika.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Thailand dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer di Asia Tenggara. Namun, dibalik citra eksotis dan daya tarik pariwisatanya, tersembunyi realitas kelam berupa praktik eksploitasi seksual terhadap anak dan perempuan, khususnya di kawasan wisata seperti Bangkok, Pattaya, dan Phuket. Fenomena ini telah berkembang menjadi masalah transnasional yang kompleks akibat tingginya permintaan wisata seks, lemahnya penegakan hukum, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) dalam menanggulangi eksploitasi seksual anak dan perempuan di sektor pariwisata Thailand. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari studi literatur berbagai sumber sekunder seperti jurnal akademik, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan, dan media daring terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ECPAT memiliki kontribusi signifikan melalui berbagai strategi, seperti kampanye edukatif, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, advokasi kebijakan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan dan identifikasi dini korban. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah proyek "Together to End Sexual Exploitation of Children in Travel & Tourism in Phang-Nga" yang menunjukkan efektivitas sinergi antara ECPAT dan pemerintah Thailand dalam membentuk sistem perlindungan anak yang responsif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ECPAT tidak hanya berperan sebagai pelindung korban, tetapi juga sebagai agen transformasi yang mendorong terciptanya ekosistem pariwisata yang etis, aman, dan ramah anak, sejalan dengan perspektif Human Security yang menempatkan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat individu sebagai prioritas utama dalam agenda keamanan global.

Kata Kunci: *Thailand, ECPAT, Eksploitasi Seksual, Pariwisata, Human Security*

## Abstract

Thailand is known as one of the most popular tourist destinations in Southeast Asia. However, behind its exotic image and tourist appeal lies a dark reality of sexual exploitation of children and women, particularly in tourist areas such as Bangkok, Pattaya, and Phuket. This phenomenon has evolved into a complex transnational issue due to high demand for sex tourism, weak law enforcement, and social and economic inequalities. This study aims to analyze the strategic role of ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) in addressing sexual exploitation of children and women in Thailand's tourism sector. Using a descriptive qualitative approach, data was collected from a literature review of various secondary sources such as academic journals, international organization reports, policy documents, and reputable online media. The research findings indicate that ECPAT has made significant contributions through various strategies, including educational campaigns, training for tourism industry stakeholders, policy advocacy, and the use of digital technology for reporting and early identification of victims. One notable initiative is the project "Together to End Sexual Exploitation of Children in Travel & Tourism in Phang-Nga," which demonstrates the effectiveness of the synergy between ECPAT and the Thai government in establishing a responsive and sustainable child protection system. In conclusion, ECPAT not only acts as a protector of victims but also as a transformative agent driving the creation of an ethical, safe, and child-friendly tourism ecosystem, in line with the perspective of Human Security, which prioritizes the safety, well-being, and dignity of individuals as the top priority in the global security agenda.

*Keywords: Thailand, ECPAT, Sexual Exploitation, Tourism, Human Security*

## PENDAHULUAN

Permasalahan tentang prostitusi di dunia ini tidak ada habisnya. Di satu sisi banyak pihak yang menentang akan hal ini, tetapi di sisi lain ada juga pihak yang mendukung. Walaupun dianggap amoral oleh banyak orang, namun industri sex masih bertahan hingga saat ini. Segencar apapun pemerintah menyatakan ilegal, tidak mudah untuk memusnahkan prostitusi dari suatu negara karena selalu ada yang membutuhkan. Di Asia Tenggara, ada Thailand yang terkenal dengan pariwisata seksnya. Fenomena wisata seks di Thailand telah lama menjadi perhatian global, terutama karena keterkaitannya dengan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan. Kemudahan akses, lemahnya pengawasan, serta permintaan tinggi dari wisatawan domestik dan mancanegara menjadikan Thailand sebagai salah satu episentrum child sex tourism di kawasan Asia. Pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan devisa yang diandalkan oleh Thailand sejak awal industri ini dibuka, bersanding dengan industri perbankan sebagai penyumbang devisa terbesar di bidang jasa di Thailand. Namun di sisi

lain industri pariwisata ini memiliki dampak negatif bagi Thailand terutama dalam pariwisata seks anak (Lestari; Anom Wiranata; Kawitri Resen; 2014: 1).

Thailand memiliki permasalahan dengan sex tourism, istilah sex tourism yaitu wisatawan yang pergi ke negara lain secara khusus untuk membeli layanan seksual dari perempuan dan laki-laki lokal. Thailand memiliki sekitar 250.000 orang yang bekerja di industri seks, menempatkannya di posisi ke-8 secara global, menurut statistik yang diterbitkan oleh International Union of Sex Workers (IUSW). Pemingkatan yang diterbitkan pada Oktober 2023 tersebut memperkirakan jumlah pekerja seks di 20 negara teratas, dengan memperhitungkan prostitusi, seks telepon, model webcam, dan masih banyak lagi. Dengan munculnya layanan terkait seks melalui saluran daring, serikat pekerja memperkirakan jumlah pekerja seks akan terus meningkat di masa mendatang. IUSW menambahkan bahwa karena prostitusi adalah ilegal di Thailand, pendapatan sekitar \$6,4 miliar yang dihasilkan oleh pekerja seks di negara tersebut setiap tahunnya tidak termasuk dalam produk domestik bruto negara tersebut. Hal ini juga membuat pekerja seks di Thailand rentan terhadap prostitusi paksa, kekerasan, dan kurangnya kebebasan dan manfaat terkait pekerjaan, seperti tunjangan medis dan perlindungan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Banyaknya wisatawan seks dalam jumlah besar membuat sex tourism di Thailand semakin berkembang. Menurut lembaga riset yang berbasis di AS "Protection Project", perkiraan jumlah anak-anak korban prostitusi di Thailand berkisar 12.000 anak dan pemerintah memperkirakan sebanyak 5% anak tersebut adalah laki-laki (Nation Thailand, 2024).

Kasus tragis terkait eksploitasi perempuan dan sexual slavery telah ada sejak lama. Sejak jaman Ayuthya (1350-1776). Pada pemerintahan Ayuthya yang melegalkan prostitusi di Thailand, inilah yang merupakan awal dari istilah wisata seks di Thailand. Wanita dan anak-anak lebih sering menjadi korban dari wisata seks ini. Saat bersaing di pasar global, pertumbuhan migrasi, ekonomi, dan prostitusi di Thailand selalu terkait. Prostitusi ini bahkan menjadi bisnis yang menguntungkan bagi Thailand dan turis. Meskipun ilegal sejak lama, prostitusi masih memiliki kehadiran yang sangat jelas di Thailand. Selama beberapa dekade, destinasi tertentu di Thailand telah menjadi terkenal dengan prostitusi anak dan wisata seks yaitu seperti di Kota Bangkok, Pattaya, Pantai Patong di Phuket, dan Chiang Mai. Tempat-tempat yang sering dijadikan sebagai sarana prostitusi dan eksploitasi seksual adalah karaoke, panti pijat, hotel dan bahkan restoran.

Wisata seks di Thailand tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari campuran berbagai faktor sejarah, ekonomi, sosial, dan hukum yang saling berkaitan. Secara

historis, praktik prostitusi memang sudah ada sejak zaman Kerajaan Ayutthaya, bahkan sempat dilegalkan dan dikenakan pajak, yang membuatnya jadi bagian dari sistem ekonomi lokal. Saat perang Vietnam, Thailand menjadi tempat "istirahat dan rekreasi" bagi tentara Amerika, yang semakin memperkuat citra negara ini sebagai tujuan wisata seksual. Secara ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mendorong sebagian orang, termasuk anak-anak, terjebak dalam lingkaran eksploitasi seksual demi bertahan hidup atau membantu keluarga. Industri pariwisata yang besar juga ikut menyuburkan permintaan, karena wisatawan mancanegara sering datang bukan hanya untuk budaya atau pantai, tapi juga untuk "hiburan malam." Sementara itu, penegakan hukum terhadap prostitusi, terutama yang melibatkan anak di bawah umur, masih lemah dan sering dibayangi oleh korupsi serta minimnya perlindungan terhadap korban. Jadi, bukan cuma soal ekonomi atau sejarah saja, tapi juga sistem hukum dan sosial yang belum cukup kuat untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi.

Thailand sendiri sudah mengeluarkan Undang-Undang tentang pelarangan prostitusi yang sudah aktif sejak tahun 1996 serta Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia yang didirikan pada tahun 2008 (ECPAT International, 2013: 15). Thailand memiliki beberapa mekanisme yang berhubungan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual, seperti the National Committee on Trafficking yang terdiri dari berbagai departemen pemerintah dan kementerian dan LSM di tingkat nasional. Pada tingkat operasional ada Anti-Human Trafficking Division (AHTD) dari kepolisian Thailand, Royal Thai Police (RTP), the Centre Against Human Trafficking (CAHT) dari Kantor Jaksa Agung dan Biro untuk mencegah dan menekan perdagangan manusia dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia.

Lemahnya penegakan hukum di Thailand menjadi celah besar yang memungkinkan praktik eksploitasi seksual, termasuk terhadap anak-anak, terus berlangsung tanpa hambatan berarti. Banyak pelaku lolos dari jerat hukum karena korupsi, kurangnya sumber daya aparat, atau minimnya perhatian terhadap korban. Maka dari itu, peran organisasi non-pemerintah seperti ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) menjadi sangat penting. ECPAT hadir untuk mengisi kekosongan peran negara, dengan fokus pada perlindungan anak dari eksploitasi seksual, advokasi hukum, serta edukasi masyarakat dan pelatihan bagi penegak hukum. ECPAT memiliki tujuan utama untuk mengakhiri eksploitasi seksual anak dan perempuan secara komersial. Organisasi ini pertama kali memulai kampanye globalnya pada Mei 1990 di Chiang Mai, Thailand Utara, yang sontak menarik perhatian global. Kampanye ini secara efektif mendorong kolaborasi dari berbagai aktor

seperti pemerintah, lembaga antar pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan perempuan (ECPAT, n.d.). Sebagai bagian dari komitmennya, ECPAT telah menjadi pelopor penyelenggara tiga kongres global yang berperan penting dalam memasukkan isu eksploitasi seksual anak dan perempuan ke dalam agenda para pemimpin dan pengambil keputusan dunia, yakni Stockholm (1996), Yokohama (2001), dan Rio De Janeiro (2008). Kini, ECPAT telah berkembang dan beranggotakan 135 anggota di 111 negara di berbagai belahan dunia (ECPAT, n.d.).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana peran ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) dalam upaya penanggulangan eksploitasi seksual terhadap anak dan perempuan di sektor pariwisata di Thailand. Eksploitasi seksual, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, merupakan salah satu pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang kerap terjadi di sektor industri pariwisata, terutama di negara-negara berkembang yang menjadi tujuan wisata populer. Dalam kondisi ini, ECPAT sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) internasional memainkan peranan penting dalam upaya pencegahan, penanganan korban, serta advokasi kebijakan terkait isu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran yang dimainkan oleh ECPAT dalam menanggulangi eksploitasi seksual terhadap anak dan perempuan di Thailand, baik melalui strategi pencegahan, program pendampingan korban, maupun kampanye kesadaran publik dan kerja sama lintas sektor. Melalui studi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai pendekatan dan inisiatif yang dilakukan oleh ECPAT dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak korban eksploitasi seksual, khususnya di sektor pariwisata. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik, khususnya dalam bidang hak asasi manusia, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peran organisasi non-pemerintah dalam isu-isu transnasional yang kompleks.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan yang dijelaskan oleh (Creswell, 2014), metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam tindakan sosial serta dampaknya terhadap kehidupan individu atau kelompok melalui deskripsi naratif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut diimplementasikan untuk menggali secara menyeluruh dinamika fenomena yang menjadi fokus kajian, yakni melalui pengumpulan dan analisis data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan studi pustaka, mencakup berbagai sumber terpercaya seperti buku akademik, artikel ilmiah dari jurnal bereputasi, laporan dari situs resmi pemerintah, serta informasi dari media daring yang relevan. Tujuan dari penggunaan sumber-sumber ini adalah untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola, hubungan fenomena, serta kecenderungan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memperhatikan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Dalam prosesnya, peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, kemudian menyaring dan memilih informasi yang relevan, dilanjutkan dengan analisis isi guna mengeksplorasi makna serta implikasi dari fenomena yang diamati. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terarah terhadap isu yang dikaji dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan di Thailand

Eksploitasi seksual terhadap anak dan perempuan di Thailand telah berkembang menjadi masalah sistemik yang semakin kompleks, terutama dalam dekade terakhir. Sebagai destinasi wisata utama di Asia Tenggara, negara ini menghadapi tantangan ganda: eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) yang terkait dengan pariwisata dan lonjakan eksploitasi seksual anak secara online yang mencapai proporsi epidemi. Menurut Syifaturrahmah (2024), arus wisatawan asing yang besar turut memicu permintaan akan eksploitasi anak, mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial korban, serta merampas hak-hak dasar mereka atas pendidikan dan kesehatan.

Situasi ini semakin memprihatinkan dengan maraknya kejahatan seksual anak berbasis digital. Menurut Bangkok Post (2024), Thailand kini berada dalam kondisi darurat menyangkut eksploitasi anak secara online. Kepolisian Cyber Crime melaporkan peningkatan lebih dari 300% kasus sejak pandemi COVID-19, sebuah lonjakan yang erat kaitannya dengan meningkatnya penggunaan internet di kalangan anak-anak selama pembelajaran jarak jauh. Yang lebih mengkhawatirkan, para pelaku kini menggunakan platform populer seperti Roblox dan Discord untuk mendekati korban dengan teknik grooming yang semakin canggih. Mereka sering kali menyamar sebagai remaja sebaya

untuk membangun kepercayaan sebelum melakukan eksploitasi, menunjukkan betapa modus operandi mereka telah berevolusi menjadi lebih terstruktur dan sulit dilacak.

Laporan Youth for SDG (2024) memperlihatkan bahwa masalah ini tidak hanya melibatkan warga lokal, tetapi juga korban dari negara-negara tetangga seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja yang menjadi sasaran perdagangan manusia. Sekitar 30-40% korban berasal dari negara lain, menghadapi tantangan tambahan seperti hambatan bahasa, status imigrasi ilegal, dan ketiadaan jaringan dukungan sosial. Industri seks di Thailand didorong oleh berbagai faktor struktural, termasuk ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan pariwisata yang meng-komodifikasi tubuh perempuan dan anak-anak.

Dampak yang ditimbulkan oleh eksploitasi ini bersifat kompleks dan merusak. Laporan ECPAT International, yang berjudul "Collective Action to End Child Sexual Exploitation and Abuse Regional Workshop" (2024) mengungkap bahwa korban mengalami trauma psikologis yang mendalam seperti depresi, gangguan stres pasca trauma (PTSD), dan bahkan kecenderungan bunuh diri, terutama dalam kasus sexual extortion. Dari segi kesehatan fisik, banyak perempuan dan anak-anak mengalami kehamilan tidak diinginkan yang berujung pada aborsi tidak aman, serta peningkatan risiko tertular penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Di tingkat sosial, anak-anak yang menjadi korban seringkali kehilangan akses pendidikan akibat stigma, kemiskinan, atau keterpaksaan terlibat dalam eksploitasi. Kelompok rentan seperti anak jalanan, pengungsi, dan komunitas marginal semakin terpinggirkan, menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti perlindungan sosial dan kesehatan.

Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi digital, kendala hukum, dan norma budaya turut memperparah situasi ini. Platform online, termasuk game dan media sosial, sering disalahgunakan untuk grooming dan distribusi materi pelecehan anak. Sementara itu, hukum yang tidak adaptif terhadap kejahatan digital dan budaya masyarakat dan institusi yang enggan membahas isu eksploitasi seksual secara terbuka membuat banyak kasus tidak tertangani dengan baik. Kelompok marjinal, seperti anak perempuan, anak dengan disabilitas, dan anak LGBTQIA+, menjadi lebih rentan dieksploitasi karena diskriminasi dan kurangnya perlindungan khusus (ECPAT International, 2024).

## Peran ECPAT

Salah satu langkah utama ECPAT dalam memerangi eksploitasi seksual anak dan Perempuan di sektor pariwisata Thailand adalah dengan membangun kesadaran kritis di tingkat akar. Strategi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program edukasi intensif

yang secara sistematis menysasar seluruh pemangku kepentingan dalam rantai industri pariwisata, mulai dari staf hotel, agen perjalanan, hingga aparat penegak hukum. Di wilayah Phang Nga, ECPAT merancang modul pelatihan interaktif yang mengintegrasikan keterampilan identifikasi korban, mekanisme pelaporan yang tanggap, serta pendekatan psikologis awal dalam mendampingi anak-anak yang menjadi korban. Selain itu ECPAT juga meluncurkan kampanye kesadaran publik yang secara khusus ditujukan kepada wisatawan asing kelompok yang kerap terlibat dalam kasus ESA. Materi kampanye disusun dalam berbagai bahasa dan disebarluaskan secara strategis di bandara, kawasan wisata utama, serta tempat akomodasi, dengan tujuan tidak hanya mencegah tindakan eksploitasi, tetapi juga memberikan efek jera bagi calon pelaku (ECPAT International, 2025).

Di level kebijakan, ECPAT memainkan peran sebagai katalisator reformasi dengan memberikan masukan berbasis riset kepada pemerintah Thailand. Salah satu pencapaian nyata adalah diadopsinya Child Safe Tourism Guidelines, yang mewajibkan seluruh pelaku industri pariwisata mengintegrasikan protokol perlindungan anak ke dalam standar operasional mereka (ECPAT International, 2025). Dalam hal penegakan hukum, ECPAT turut berkontribusi dalam pembentukan unit khusus di kepolisian Phang Nga yang secara eksklusif menangani kasus ESA. Tidak hanya memberikan pelatihan teknis, ECPAT juga menjalin kolaborasi dengan pakar hukum internasional untuk menyusun panduan penuntutan yang lebih peka terhadap trauma korban. Dampaknya cukup signifikan yaitu dalam tiga tahun terakhir dengan jumlah kasus yang berhasil diproses secara hukum mengalami peningkatan.

Pelibatan sektor swasta menjadi bagian penting dari pendekatan ECPAT. Melalui The Code of Conduct for the Protection of Children, lebih dari 120 perusahaan pariwisata di Thailand telah berkomitmen menerapkan enam prinsip utama perlindungan anak, yang mencakup pelatihan karyawan, penyediaan kanal pelaporan internal, dan kerja sama dengan lembaga terkait. Untuk memastikan komitmen tidak berhenti pada formalitas, ECPAT membangun sistem pemantauan independen yang mengawasi implementasi nyata di lapangan. Beberapa jaringan hotel bahkan telah menerapkan teknologi seperti verifikasi usia dan pengenalan wajah untuk mencegah akses pelaku kekerasan seksual ((ECPAT International, 2025).

Menanggapi akar struktural dari masalah ESA yang berkaitan erat dengan kerentanan ekonomi, ECPAT merancang program pemberdayaan komunitas yang menysasar kelompok paling rentan. Di desa-desa pesisir Phang Nga, pusat pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan khususnya untuk perempuan muda diciptakan sebagai alternatif

penghidupan yang aman dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, ECPAT membentuk Community Watch Groups yang terdiri dari pemuda, tokoh masyarakat, serta para penyintas ESA. Kelompok ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini sekaligus jaringan dukungan psikososial bagi korban. Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti efektif dalam membangun norma sosial yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak ((ECPAT International, 2025).

Di tingkat regional, ECPAT memfasilitasi kerja sama lintas batas dalam mengatasi kompleksitas jaringan perdagangan anak yang kerap memanfaatkan disparitas regulasi antar negara. Selain itu, mereka juga menjadi pelopor dalam pengembangan kerangka perlindungan anak di ruang digital sebuah respons adaptif terhadap meningkatnya kasus ESA daring selama pandemi. Pemanfaatan teknologi mutakhir, mulai dari kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola eksploitasi hingga sistem pelaporan berbasis blockchain yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor, menunjukkan kesiapan ECPAT menjawab tantangan era baru. Model intervensi yang terbukti efektif di Phang Nga kini tengah direplikasi di berbagai destinasi wisata lain di Thailand, dengan penyesuaian konteks lokal. Pendekatan ECPAT tidak hanya terfokus pada penyelamatan korban, tetapi juga membangun lanskap industri pariwisata yang etis, ramah anak, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor yang mereka bangun mempertegas bahwa perlindungan anak bukan semata tugas lembaga sosial, melainkan sebuah tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat (ECPAT International, 2025).

#### Kolaborasi ECPAT dengan Pemerintah Thailand

Sebagai salah satu negara tujuan wisata utama di Asia Tenggara, Thailand menghadapi tantangan serius terkait dengan eksploitasi seksual anak dan perempuan di sektor pariwisata. ECPAT merupakan salah satu aktor penting dalam mengatasi permasalahan ini. ECPAT telah menjalin kolaborasi yang strategis dengan pemerintah Thailand dalam merancang dan melaksanakan berbagai inisiatif perlindungan anak di sektor pariwisata. Salah satu bentuk kolaborasi antara ECPAT bersama mitra lokal seperti Phang Nga Children's Home serta Diocesan Social Action Center (DISAC) dalam upaya perlindungan anak melalui proyek yang dijalankan di wilayah Phang Nga yaitu "Together to End Sexual Exploitation of Children in Travel & Tourism in Phang-Nga" yang juga didukung oleh Kementerian Pariwisata Thailand. Wilayah Phang Nga dipilih karena merupakan salah satu destinasi wisata populer di Thailand yang memiliki tingkat kunjungan turis internasional yang cukup tinggi. Daerah ini terletak di dekat Phuket dan Khao Lak yang merupakan dua

wilayah yang ramai dengan aktivitas pariwisata. Tetapi, daerah wisata ini sering kali menjadi tempat rawan yang terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak.

Kolaborasi antara ECPAT International, ECPAT Foundation Thailand, dan pemerintah Thailand dalam proyek "Together to End Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism in Phang Nga" memiliki tujuan utama untuk membangun destinasi wisata yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga aman bagi anak-anak. Pendekatan ini dilakukan dengan menyatukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor pariwisata, komunitas lokal, serta lembaga pemerintah daerah seperti kantor pariwisata setempat dan rumah perlindungan anak (Phang-Nga Children's Home). Tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah menciptakan sistem perlindungan anak yang kuat dalam konteks pariwisata, sekaligus meningkatkan kesadaran serta kapasitas masyarakat dan pelaku industri pariwisata untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons eksploitasi seksual terhadap anak-anak, khususnya di kawasan wisata yang ramai seperti Khao Lak dan sekitarnya (ECPAT, 2025).

Dampak dari proyek ini dapat dilihat dari peningkatan kolaborasi antar sektor, pelatihan staf hotel dan tour guide tentang perlindungan anak, serta pembentukan jaringan lokal perlindungan anak di Phang Nga. Selain itu, proyek ini juga mendorong pemberdayaan anak dan remaja, termasuk mereka yang berasal dari komunitas migran atau kelompok rentan, agar mampu mengenali risiko eksploitasi serta mengetahui cara melapor dan mengakses dukungan yang tersedia. Keberhasilan pendekatan ini menjadikan proyek Phang Nga sebagai model best practice yang direkomendasikan untuk direplikasi di daerah wisata lainnya, baik di Thailand maupun di negara lain dengan tantangan serupa. ECPAT menekankan bahwa perlindungan anak dalam sektor pariwisata harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan kerja sama lintas sektor seperti yang dilakukan di Phang Nga menunjukkan efektivitas dari pendekatan tersebut (ECPAT, 2025).

#### Tantangan yang dihadapi ECPAT

Meskipun proyek Together to End Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism in Phang Nga telah memberikan sebuah kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan anak di sektor pariwisata, tetapi implementasinya di lapangan tak luput dari sebuah tantangan. ECPAT dalam mengimplementasikan proyek bersama dengan pemerintah menghadapi berbagai tantangan baik itu berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, tantangan utama muncul karena belum optimalnya

penegakan hukum terkait eksploitasi seksual terhadap anak (ESKA) di Thailand. Meskipun kebijakan perlindungan anak dan perempuan telah ada, namun implementasinya seringkali lemah, baik dari segi kapasitas lembaga yang menangani kasus maupun dari minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang isu ESKA dalam konteks pariwisata. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pelaku industri pariwisata mengenai peran mereka dalam mencegah eksploitasi seksual anak menjadi penghambat tersendiri. Tingginya tingkat rotasi tenaga kerja di sektor ini juga menghambat efektivitas pelatihan yang dilakukan, karena staf yang sudah dilatih sering berpindah sebelum dapat menerapkan praktik perlindungan anak secara konsisten.

Sementara di sisi eksternal, tantangan mencakup kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah daerah yang terlibat, seperti dinas pariwisata, lembaga perlindungan anak, serta aparat penegak hukum. Birokrasi yang kaku dan keterbatasan anggaran menjadi penghambat signifikan yang memperlambat integrasi program perlindungan anak ke dalam strategi pembangunan pariwisata yang lebih luas dan berkelanjutan. Anak-anak dari kelompok rentan, seperti migran, anak jalanan, atau mereka yang tidak memiliki dokumen resmi, pun sulit dijangkau oleh sistem perlindungan formal yang ada. Status hukum yang tidak jelas membuat mereka enggan melapor atau mencari bantuan karena ketakutan akan deportasi atau perlakuan diskriminatif. Selain itu, belum tersedianya sistem data nasional yang kuat dan terintegrasi terkait eksploitasi anak di sektor pariwisata semakin menyulitkan pemerintah dan mitra sipil dalam menyusun kebijakan berbasis bukti yang lebih responsif dan adaptif terhadap kompleksitas isu ini. Kondisi tersebut menuntut perbaikan sistem koordinasi, alokasi sumber daya, serta pengembangan mekanisme pengumpulan data yang komprehensif agar upaya perlindungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain tantangan internal dan eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah faktor lain yang turut menjadi tantangan signifikan dalam isu ini. Pertama, stigma sosial dan budaya yang melekat pada isu eksploitasi seksual anak menyebabkan topik tersebut sulit untuk diperbincangkan secara terbuka, sehingga korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena kekhawatiran akan diskriminasi dan pengucilan sosial dari masyarakat sekitar. Kedua, ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap sektor pariwisata sebagai sumber penghidupan utama memunculkan dilema antara kebutuhan ekonomi keluarga dan upaya perlindungan anak, yang pada beberapa kasus menyebabkan penurunan efektivitas intervensi perlindungan secara menyeluruh. Terakhir, peran media serta praktik promosi pariwisata yang kurang memperhatikan aspek perlindungan anak

turut memperparah kondisi dengan mendorong terjadinya praktik pariwisata seksual yang merugikan korban.

#### Relevansi Teori Human Security dalam Kasus Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan

Menurut UNDP, konsep keamanan manusia (human security) mencakup dua dimensi utama. Pertama, perlindungan terhadap ancaman jangka panjang seperti kelaparan, penyakit, dan represi. Kedua, pengamanan individu dari gangguan darurat yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, tempat kerja, maupun dalam komunitas (UNDP, 1994). Dalam uraian lebih lanjut, UNDP menegaskan bahwa esensi dari keamanan manusia terletak pada hal-hal mendasar—seperti memastikan anak-anak dapat tumbuh tanpa risiko kematian dini, mencegah penyebaran penyakit, menjaga stabilitas pekerjaan, mencegah konflik etnis berkembang menjadi kekerasan, serta menjamin ruang bagi suara oposisi untuk tetap bersuara. Intinya, pendekatan ini menempatkan fokusnya bukan pada senjata dan militer, melainkan pada perlindungan hidup dan pemuliaan martabat manusia (UNDP, 1994).

Dalam perspektif eksploitasi anak, baik seksual, tenaga kerja maupun perdagangan manusia secara langsung mengancam hak dasar, keselamatan anak, dan kesejahteraan yang merupakan inti dari teori human security. Anak-anak dan perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual di sektor pariwisata Thailand menghadapi berbagai bentuk kekerasan, dari pelecehan fisik hingga tekanan psikologis yang parah. Mereka juga mengalami pengucilan sosial dan stigma, yang merusak rasa aman dalam komunitas mereka (UNODC, 2022). Peristiwa ini tidak hanya pelanggaran terhadap hak asasi, tetapi juga bentuk kekerasan struktural yang mengguncang fondasi keamanan manusia.

Sebagai organisasi yang menangani eksploitasi seksual anak, ECPAT berfokus melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan perdagangan manusia, yang dapat membahayakan tubuh dan kondisi psikologis mereka (Octaefania, 2022). ECPAT bekerja sama dengan lembaga sosial dan hukum untuk menyediakan tempat aman, layanan kesehatan mental, dan pendampingan hukum bagi anak-anak dan perempuan korban kekerasan seksual. Ini mencerminkan upaya melindungi keamanan fisik dan psikologis individu secara langsung (ECPAT, 2023). Upaya ini sejalan dengan pendekatan human security yang menitikberatkan pada perlindungan menyeluruh terhadap individu dari berbagai bentuk ancaman (Octaefania, 2022).

## SIMPULAN

Eksplorasi seksual terhadap anak dan perempuan dalam sektor pariwisata di Thailand merupakan permasalahan kompleks yang berakar pada ketimpangan sosial, lemahnya sistem hukum, dan tingginya permintaan wisata seks dari wisatawan asing. Penelitian ini menunjukkan bahwa ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) memainkan peran strategis dalam upaya penanggulangan isu ini melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. ECPAT tidak hanya berfokus pada penyelamatan korban, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi publik, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, advokasi kebijakan berbasis riset, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan deteksi dini. Proyek Together to End Sexual Exploitation of Children in Travel & Tourism in Phang-Nga menjadi bukti keberhasilan sinergi antara ECPAT dan pemerintah Thailand dalam membangun sistem perlindungan anak yang responsif dan berkelanjutan.

Peran ECPAT secara keseluruhan sejalan dengan prinsip Human Security, yang menempatkan perlindungan, kesejahteraan, dan martabat individu sebagai inti dari pembangunan dan keamanan global. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah Thailand memperkuat penegakan hukum secara menyeluruh dan bebas dari praktik korupsi, memperluas kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil seperti ECPAT, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas ke dalam kebijakan pariwisata nasional. Selain itu, pengembangan sistem data nasional yang akurat dan komprehensif tentang eksploitasi anak sangat penting guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

ECPAT Thailand telah memainkan peran penting dalam merespons isu ini melalui advokasi kebijakan, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, serta pemberdayaan komunitas lokal. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya angka pelaporan kasus, keterbatasan dalam penegakan hukum, dan kurangnya standar perlindungan anak yang diterapkan secara luas dalam sektor pariwisata. Untuk mengatasi masalah ini secara lebih menyeluruh, perlu adanya peningkatan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, industri pariwisata, dan lembaga internasional guna membangun ekosistem perlindungan anak yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk mengembangkan dan menerapkan standar nasional yang mengikat bagi sektor pariwisata dalam upaya perlindungan anak. Edukasi publik dan kampanye kesadaran juga perlu diperluas untuk mengubah pola pikir masyarakat dan mendorong pelaporan yang lebih aktif. Di sisi lain, peningkatan kapasitas

aparatus penegak hukum dan penyediaan layanan pendukung yang mudah diakses bagi korban eksploitasi seksual merupakan langkah penting dalam menjamin keadilan dan pemulihan korban. Dengan pendekatan terpadu dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, eksploitasi seksual anak dan perempuan dalam pariwisata dapat ditekan secara signifikan, serta menciptakan sektor pariwisata yang lebih aman, inklusif, dan bertanggung jawab di Thailand.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, S. F. (2017). Hambatan pemerintah Thailand dalam mengatasi eksploitasi seksual komersial anak (Skripsi Sarjana, Universitas Jember). Universitas Jember Repository. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82312>
- Bangkok Post. (2024). Online sexual abuse now at severe levels. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2866463/online-sexual-abuse-now-at-severe-levels>
- CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY, AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES) DALAM MENANGANI KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI THAILAND PADA TAHUN 2019-2021 - UNAS Repository. <http://repository.unas.ac.id/10004/>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
- CSEC Oleh Wisatawan Asing di Thailand. DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional) Universitas Udayana. Vol. 1 No. 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/11620>
- ECPAT International. (2023) Country Overview: Sexual Exploitation of Children in Thailand. Bangkok: ECPAT, 2023.
- ECPAT International. (2024). Collective Action to End Child Sexual Exploitation and Abuse: Regional Workshop, 4–7 March 2024, Bangkok, Thailand. Bangkok: ECPAT International.
- ECPAT International. (2025). Protecting children in travel and tourism: Case study – Phang Nga, Thailand. Bangkok: ECPAT International. [https://ecpat.org/wp-content/uploads/2025/02/Case-Study\\_Phang-Nga\\_Thailand\\_sustainable-destinations.pdf](https://ecpat.org/wp-content/uploads/2025/02/Case-Study_Phang-Nga_Thailand_sustainable-destinations.pdf)
- ECPAT International. (n.d.). Child protection in travel and tourism. <https://ecpat.org/sectt/>
- ECPAT. (n.d.). About Us. [ecpat.org. https://ecpat.org/about-us/](https://ecpat.org/about-us/)

- ECPAT. (n.d.). Our Members. [ecpat.org](https://ecpat.org/our-members/). <https://ecpat.org/our-members/>
- Lestari, E, M., Wiranata, I., Resen, P. (2014). Peran ECPAT Dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing di Thailand. DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional) Universitas Udayana. Vol. 1 No. 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/11620>
- Nation Thailand. (2024). Thailand ties with Brazil in number of sex workers. [nationthailand.com](https://www.nationthailand.com/news/general/40037735) <https://www.nationthailand.com/news/general/40037735>
- Octaefania, Nurfisyabilla Orfa. (2022). PERANAN ECPAT INTERNASIONAL (END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY, AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES) DALAM MENANGANI KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI THAILAND PADA TAHUN 2019-2021 - UNAS Repository. <http://repository.unas.ac.id/10004/>
- P2K STEKOM. (n.d.). Provinsi Phang Nga. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Provinsi\\_Phang\\_Nga](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Provinsi_Phang_Nga)
- Phang Nga, Thailand. Bangkok: ECPAT International. [https://ecpat.org/wp-content/uploads/2025/02/Case-Study\\_Phang-Nga\\_Thailand\\_sustainable-destinations.pdf](https://ecpat.org/wp-content/uploads/2025/02/Case-Study_Phang-Nga_Thailand_sustainable-destinations.pdf)
- Rizky, L. (2024). Efektivitas Konvensi Hak Anak (ICRC) dalam kasus eksploitasi anak di Thailand (Studi kasus tahun 2019–2022). WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(3), 154–171. and Abuse: Regional Workshop, 4–7 March 2024, Bangkok, Thailand. Bangkok: ECPAT International.
- Syifaturohmah, S., Zulianti, A. D., Aisyah, A. N., Cahyanengsih, I., Mastuti, R. D., & Rizky, L. (2024). Efektivitas Konvensi Hak Anak (ICRC) dalam kasus eksploitasi anak di Thailand (Studi kasus tahun 2019–2022). WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(3), 154–171.
- UNDP. (1994, Januari 1). Human Development Report 1994. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). Global Report on Trafficking in Persons 2022. Vienna: UNODC, 2022. [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP\\_2022\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf)
- Youth for SDG. (2024, September 1). Sex industry and its impact on youth and gender equality. <https://youthforsdg.org/2024/09/01/sex-industry/>.